

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006
- Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Bayumedia, Malang, 2005
- Adji Indrianto Seno, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 1997
- Agus Dwiyanto, dkk., *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008)
- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, cet. ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Anonim, 2013, "Gratifikasi Seks dapat dijerat UU Tipikor", URL : <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt51a72dfed1d6d>, Diakses pada tanggal 24 Desember 2015
- Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Buku Kompas
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum*, ctk. Pertama, PT. Rafika Aditama, Bandung

- Diaz Nurima Sawitri “*Penegakan Hukum Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi di Indonesia Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta (2008).
- Doni Muhahardiansyah, dkk, 2010, *Buku Saku Memahami Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*, dkk., Buku Saku: Memahami Gratifikasi, Cetakan pertama (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010)
- E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas, Jakarta
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta
- H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005
- Hadjon Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis,Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007
- M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam hukum pidana islam*
- Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2010
- Philipus M. Hadjon dalam Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan Pertama, LaskBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008

- Pope Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2003
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; 2005
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2001)
- Romli Atmasasmita, “*Gratifikasi sama dengan Suap*”, SindoNews, Kolom Nasional, Edisi Kamis, 29 Agustus 2013 diakses pada tgl. 16 Januari 2015.
- Sekitar Masalah Korupsi (Aspek Nasional dan Aspek Internasional)*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1997
- Saifudin, *Proses Pembentukan Undang-Undang*, Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan UU di Era Reformasi, Ringkasan Desertasi, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*, ctk Keempat, PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985
- Suwondo, 1982, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Syamsa Ardisasmita, diakses melalui [http://hileud.co/kpk-definisi korupsi](http://hileud.co/kpk-definisi_korupsi) tgl. 16 Januari 2015.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005
- Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Yonky Karman “*Korupsi Manusia Indonesia*”, Opini Kompas, tgl. 16 Januari 2015

## **B. Sumber Perundang-undangan**

Isi Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah, “Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah: ... Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti tersebut pada Pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian / janji tersebut kepada yang berwajib”.

Pasal 12b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembukaan UUD 1945 alinea IV

Penjelasan Pasal 12B, Ayat (1), Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/ 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## **C. Sumber Lain**

Agustinus Edy Kristianto, diakses melalui [http://korupsi.vivanews.com/news/read/28525-suap\\_korupsi\\_tanpa\\_akhir\\_1tgl](http://korupsi.vivanews.com/news/read/28525-suap_korupsi_tanpa_akhir_1tgl). 16 Januari 2015.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan HAM, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak pidana Korupsi*, (Jakarta:2002)

Corruption.net, “Singapore: NUS Professor Charged with Sexual Gratification Corruption Charges”, 27 Juli 2012, <http://www.corruption.net/singapore-nus-law-professor-charged>

sexualgratification-corruption-charges/02115 diakses pada 11  
November 2015

[http : //www.kpk.go.id/modules/editor/doc/kumpulan\\_UU.pdf](http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/kumpulan_UU.pdf) diakses  
tanggal 31 November 2015

[http//kpk-12-jenis-gratifikasi-ini-tidak-perlu-dilaporkan](http://kpk-12-jenis-gratifikasi-ini-tidak-perlu-dilaporkan) diakses pada tanggal  
29 Desember 2015

<http://infohukum.co.cc/gratifikasi-dalam-pegawai-negeri/> diakses tanggal 12  
Desember 2015

<http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/definisi-korupsi> diakses tanggal 6  
November 2015

KPK, Buku Saku : *Memahami untuk membasmi*, 2006

Laporan Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, 18 September 2013

Lihat misalnya: Surat Edaran Nomor SE – 10/MK.01/2013 tentang Program  
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan,  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  
Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pengendalian  
Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan , dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  
Nomor 20/ Permen-KP/2013 tentang Pelaporan Gratifikasi di  
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Muladi, *Tindak Pidana Suap sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan  
Penanggulangannya*, makalah dalam Seminar Nasional “Suap,  
Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum  
Pidana” Kerjasama FH UNDIP dengan KY di Semarang pada  
tanggal tgl. 16 Januari 2015

Pendapat dari Agustinus Pohan, Narasumber dalam FGD Penerapan Pasal  
gratifikasi yang dianggap suap, Jakarta, 18 September 2013

Putusan Badan Peradilan, Varia Peradilan, No. 223 Th. XIX. April 2004

Tim Redaksi Kompas, diakses melalui <http://kompas.com> tgl. 16 Januari  
2015. “Laporan Korupsi di KPK menumpuk”, Harian Kompas,  
edisi Kamis, 03 April 2008

UN *Anti Corruption Policy, Global Programme Against Corruption*, Draft  
UN *Manual on Anti Corruption Policy*, Vienna, June 2001, hal. 2  
dalam : Arief Amrullah, *Korupsi, Politik dan Pilkada* (Dalam  
Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia), Jurnal Ilmu  
Hukum MADANI, FH-UNISBA, Bandung, 2005

Yonky Karman "*Korupsi Manusia Indonesia*", Opini Kompas, tgl. 16 Januari  
2015.